Gema Ekonomi
e-ISSN: 2621-0444
Vol. 13 No. 2 Februari 2023

https://journal.unigres.ac.id/index.php/GemaEkonomi/index

Gema Ekonomi (Jurnal Fakultas Ekonomi)
e-ISSN: 2621-0444
Vol. 12 No. 2 Februri 2023

ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 2017-2021

Adhitya Rachma Nugraha, Daryono Soebagyo
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
Email : Nugrahaav6@gmail.com, daryono51@ymail.com

Abstract

The role of the government in setting strategies to encourage the process of economic growth is very important, one of the strategies used by the government in Indonesia is fiscal decentralization. Fiscal decentralization is the granting of authority from the central government to regional governments to regulate their own territory. This research pays attention to the effect of profit-sharing funds, general allocation funds, special allocation funds, and profit-sharing funds on economic growth in Indonesia by using panel data regression analysis. Based on the results of panel data regression analysis in Indonesia during the 2017-2021 period, it shows that profit-sharing funds, general allocation funds have a positive influence on economic growth. Meanwhile, special allocation funds have a negative and significant impact on economic growth

.

Kata Kunci: pertumbuhan ekonomi, DBH, DAU, DAK, INV, panel

Abstract

Peran pemerintah dalam mengatur strategi guna mendorong proses pertumbuhan ekonomi sangatlah penting, salah satu strategi yang digunakan pemerintah di Indonesia yakni dengan desentralisasi fiscal. Pemerintah memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam menangani urusan daerahnya sendiri yang tertuang dalam peraturan desentralisasi fiskal. Penelitian ini memperhatikan dampak dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan alat analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel di Indonesia selama periode 2017-2021 menunjukkan bahwa dana bagi hasil, dana alokasi umum mempungai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara dana alokasi khusus memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Keywords: growth, DBH, DAU, DAK, INV, panels

PENDAHULUAN

Dalam melakukan pembangunan suatu negara salah satu indikator penting adalah pertumbuhan ekonomi. Setiap negara memiliki strategi yang berbeda-beda untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya, bahkan strategi tersebut dilakukan hingga pemerintah daerah. Selain itu peningkatan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakatnya agar lebih baik lagi dan menjejaki negara-negara maju. Pertumbuhan ekonomi adalah kegiatan meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa dalam masyarakat serta peningkatan kapasitas produksi tingkat nasional sangat dipengaruhi oleh daerah (Astria, 2014).

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiscal adalah kewenangan dan keleluasaan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya daerahnya (Latifah & Rahayu, 2019). Sebelumnya pada tahun 2001 di Indonesia menganut system pemerintahan sentralistik, pada saat itu mengakibatkan dominasi pada pemerintahan pusat (Chandra & Hidayat, 2017). Sehingga pemerintah menerapkan system desentralisasi fiscal dengan tujuan tiap daerah mampu mengelola daerahnya menjadi lebih baik.

Desentralisasi membahas cara mengoptimalkan kemakmuran rakyat, peningkatan kehidupan berdemokrasi, keadilan, dan menjaga hubungan antar pusat dan daerah (Rasu et al., 2019). Upaya pemerintah agar desentralisasi fiscal berjalan dengan baik dengan pemerintah pusat mengeluarkan peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yaitu adanya pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah (Rasu et al., 2019). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijadikan sebagai pembiayaan yang diperoleh dari potensi-potensi tiap daerah yang dibesarkan serta terdapat Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Setelah pemerintah memberikan fasilitas demi mendukung tiap daerah, maka dari derah-daerah tersebut harus memiliki kesiapan untuk mengelola. Sehingga tiap daerah berkompetisi untuk memajukan daerahnya masing-masing. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah selain desentralisasi fiscal, factor lainnya adalah investasi pemerintah.Pemerintah melakukan investasi bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi juga sebagai dorongan penyelenggaraan dan memajukan perekomian (Dinarjito & Dharmazi,

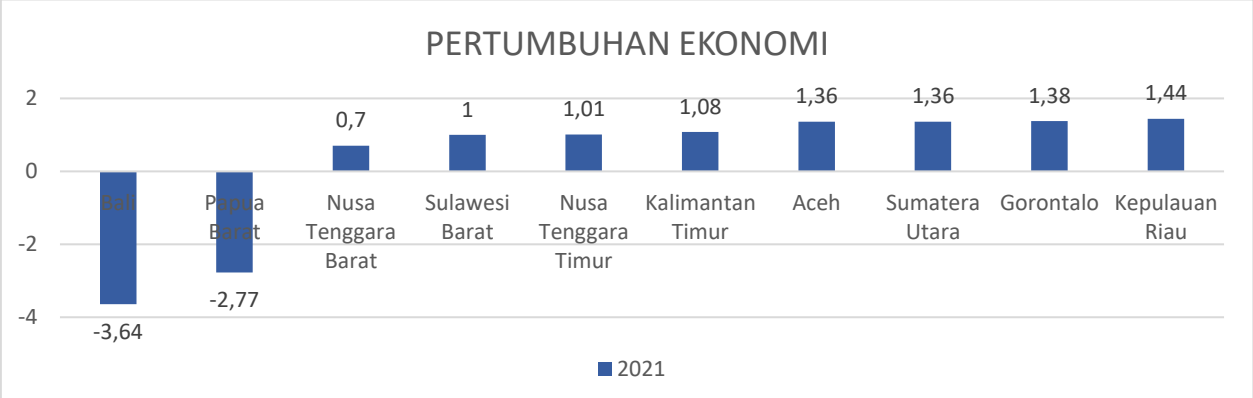

2020).

Grafik 1

10 Provinsi Pertumbuhan Ekonomi Terendah di Indonesia Tahun 2021 (%) (BPS,2021)

Pada grafik 1 merupakan pemaparan data 10 provinsi di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi terendah selama tahun 2021. Provinsi Bali memiliki peringkat pertama dengan pertumbuhan ekonomi terendah dengan nilai -3,64 kemudian Provinsi

Papua Barat dengan -2,77 dan tujuh provinsi lainnya. Provinsi Bali dan Papua Barat memiliki angka pertumbuhan ekonomi dengan nilai minus.

Faktor utama yang menyebabkan Provinsi Bali memiliki nilai pertumbuhan ekonomi terendah yaitu kebijakan pembatasan mobilitas dalam menangani kasus COVID-19 mengakibatkan terganggunya pariwisata di Provinsi Bali serta dibatasinya realisasi belanja dan transfer pada APBD (Bali, 2022). Sedangkan Provinsi Papua Barat disebabkan penurunan konsumsi pemerintah dan ekspor luar negeri serta penurunan APBD tahun 2021 yang mengakibatkan penurunan konsumsi pemerintah (Barat, 2022).

Provinsi Bali dan Papua Barat memiliki faktor-faktor yang berbeda dalam menghadapi hambatan pertumbuhan ekonomi, terlebih tujuh provinsi lainnya yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi terendah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi desentralisasi fiskal perlu dijalankan secara optimal seiring meninjau kesiapan tiap daerah dengan strateginya masing-masing untuk memajukan daerahnya yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi.

Desentralisasi fiskal memiliki relasi dengan kewajiban dan perttanggung jawab pada penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan publik untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah (Pujiati, 2004). Untuk menjalankan desentralisasi itu sendiri pemerintah daerah mendapatkan hak dan wewenang dari pusat secara penuh agar memiliki kekuasaan sehingga desentralisasi yang dijalankan berjalan efektif.

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang digunakan sebagai bahan penilaian dari perkembangan suatu pembangunan daerah atau negara, dengan menghitung fluktuasi Produk Domestik Bruto (PDRB) pada periode tertentu (Tahar & Zakhiya, 2011). Maka sistem desentralisasi fiskal dapat mendorong ekspansi ekonomi di Indonesia atau bahkan sebaliknya. *The increase in people's income is also seen from the added value of an area, such as land, capital, labor, and technology that can describe the welfare of an area* (Soebagyo et al., 2019).

Faktor lain yang diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Sesuai Peraturan Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan antara pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan DAU yang dialokasikan dari APBN untuk pembiayaan desentralisasi dengan menyerahkan seluruhnya kepada daerah sesuai kebutuhan dan prioritas tiap daerah (Rasu et al., 2019). Sehingga tujuan adanya DAU untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi tiap daerah.

Selain DAU, ada Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU dan DAK tidak dapat dipisahkan, dengan artian bahwa mempunyai fungsi yang sama. Tetapi ditujukan kepada daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus dan dijadikan sebagai prioritas nasional (Rasu et al., 2019). Faktor lainnya yaitu Dana Bagi Hasil (DBH). DBH memiliki sumber dana dari pajak dan Sumber Daya Alam (SDA). Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Pengahasilan pasal 25/29 dan 2. Sumber dana tersebut sudah diatur dalam PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 19 ayat 1 (Rasu et al., 2019).

Faktor terakhir yaitu investasi diprediksi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena biaya yang dikeluarkan membeli alat produksi dan barang modal dapat mengalihkan bahkan menambah produksi barang modal jangka waktu yang panjang dalam perkenomian (Astria, 2014). Besarnya belanja modal yang dikeluarkan pemerintah , maka semakin besar potensi peningkatan perekonomian karena belanja modal tersebut diperlukan guna membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana perekonomian daerah (Dinarjito & Dharmazi, 2020)

Pada penelitian Astria (2014) menghasilkan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak signifikan dan berpengaruh negatif terhadap PDRB sebagai pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan pada tahun 2003-2010 menggunakan analisis regresi linear berganda.

Sama halnya pada penelitian Dinarjito & Dharmazi (2020) variabel investasi dan desentralisasi fiskal memiliki hasil tidak signifikan dan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Berbeda hasil penelitian tersebut pada Rasu et al. (2019) menghasilkan bahwa DAU, DAK, dan DBH memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan pada Kota Manado pada tahun 2007-2017 dengan alat analisis regresi berganda. Dari hasil penelitian sebelumnya variabel-variabel tersebut tidak signifikan padahal secara hipotesis diasumsikan signifikan sesuai teori-teori yang ada.

Berlandaskan penjabaran tersebut, menimbulkan ketertarikan penulis membahas penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2017-2021.

.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memperhatikan pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada periode 2017-2021 dengan menggunakan analisis regresi data panel. Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependen dengan satuan data persen. Sementara variabel independennya DBH, DAU, DAK, dan Investasi diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistika (BPS).

Model ekonometrik yang diaplikasikan merupakan hasil dari modifikasi Arina et al., (2019) dimana dalam penelitian ini terpusat kepada kebijakan desentralisasi fidkal dalam 5 tahun terakhir (2017-2021). Maka model regresi pada penelitian ini sebagai berikut :

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 DBH_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 INV_{it} + \varepsilon_{it}$$

Di mana:

PE	= Pertumbuhan Ekonomi (persen)
DBH	= Dana Bagi Hasil (Miliar rupiah)
DAU	= Dana Alokasi Umum (Ribu Rupiah)
DAK	= Dana Alokasi Khusus (Ribu Rupiah)
INV	= Investasi (Miliar rupiah)
β_0	= Konstanta
$\beta_1 \cdots \beta_6$	= Koefisien regresi variabel independen
Log	= Operasi Logaritma
ε	= *Error term* (faktor kesalahan)
i	= Observasi (Provinsi)
t	= Banyaknya waktu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi model ekonometrik di muka dengan pendekatan *Pooled Least Square* (*PLS*), *Fixed Effect Model* (*FEM*) dan *Random Effect Model* (*REM*) beserta hasil uji pemilihan modelnya terangkum pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Estimasi Model Ekonometrik Regresi Data Panel - *Cross section*

Variabel	Koefisien Regresi		
	PLS	**FEM**	**REM**
C	2,40308	-17,6822	2,08485
DBH	5,90000	0,00044	-3,83000
DAU	-7,35000	1,46000	1,73000
DAK	-7,97000	-4,24000	-8,65000
INV	1,59000	1,40000	1,36000
R^2	0,00177	0,31499	0,00076
Adjusted. R^2	-0,02318	0,12233	-0,02421
Statistik *F*	0,07095	1,63497	0,03067
Prob. Statistik *F*	0,99074	0,02460	0,99817
Uji Pemilihan Model			
(1) Chow			
Cross- Section $F(32,128)$ = 1,92901; Prob. $F(32,128)$ = 0,0098			
(2) Hausman			
Cross-Section random χ^2 (4) = 22,7709; Prob. χ^2 = 0,0001			

Sumber: BPS, diolah.

Seperti yang dapat dilihat dari probabilitas atau signifikansi empiris F dan statistic X^2pada tabel 2 dengan uji FEM dan REM yang masing-masing memiliki nilai 0,024602 (< 0,05); 0,99817 (> 0,10). Menunjukkan bahwa FEM dipilih sebagai model estimasi terbaik.

Tabel 3
Model Estimasi *Fixed Effect Model (FEM)*

PE_{it}= -17,6822+ 0,00044 DBH_{it} + 1,46000DAU_{it} − 4,24000DAK_{it} + 1,40000 INV_{it}				
(0,0603)***	(0,0001)*	(0,0102)*	(0,1450)	
R^2 = 0,314992; DW = 2,409459; *F.* = 1,634978; Prob. *F* = 0,024602				

Sumber: BPS, diolah. **Keterangan:** *Signifikan pada α = 0,01; **Signifikan pada α = 0,05; ***Signifikan pada α = 0,10; Angka di dalam kurung adalah probabilitas nilai statistik t.

Menurut uji eksistensi model dengan model FEM teruji eksis dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,3149; hal ini menggambarkan potensi prediksi yang kuat dari model FEM. Akan tetapi kekuatan prediksi tersebut harus dilihat secara kritis, ternyata memiliki tiga variabel yang signifikan terhadap variabel dependen, yakni variabel Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) .

Variabel DBH dan DAU memiliki keterkaitan positif terhadap pertumbuhan dengan pola hubungan linier-linier. Maka ketika variabel DBH, dan DAU mengalami kenaikan 1% maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar masing masing 0,00044 miliar rupiah, 1,46 ribu rupiah. Sebaliknya, ketika DBH dan DAU mengalami penurunan sebesar 1% maka pertumbuham ekonomi mengalami penurunan sebesar 0,00044 miliar rupiah, dan 1,46 ribu rupiah. Sebaliknya, pada variabel DAK memiliki koefisien -4,2400 dengan pola hubungan yang sama dengan variabel sebaliknya. Ditarik kesimpulan ketika variabel independen naik 1 persen maka variabel dependen turun sebesar satuan koefisien.

Interpretasi Ekonomi

Dana Bagi Hasil (DBH) sendiri bermula dari dana APBN ke daerah guna melaksanakan desentralisasi, alokasi dana tersebut digunakan untuk menyokong kebutuhan daerah salah satunya dengan perbaikan fasilitas umum yang nantinya akan mendukung proses pertumbuhan ekonomi pada seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arina et al., (2019) yang menyatakan bahwa DBH memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado.

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki peran krusial dalam perekonomian, hal tersebut dikarenakan tujuan dari pemberian DAU yakni pemerataan penyediaan pelayanan publik, selain itu fungsi dari penerimaan DAU yakni sebagai belanja modal unruk pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maka ketika DAU mengalami peningkatakn sehingga memunculkan pertumbuhan ekonomi setelahnya. Hal ini dikuatkan oleh Wahyuni (2020) mengekumakan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhdap pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta.

Variabel DAK memiliki keterkaitan negatif hal ini muncul karena kurangnya pengoptimalan dana yang seharusnya dialokasikan pada sektor yang memiliki tingkat urgensi seperti pendidikan, layanan umum, kesehatan malah diberikan kepada sektor yang tidak terlalu darurat. Maka ketika DAK mengalami kenaikan maka akan menurunkan Pertumbuhan Ekonomi. Hasil ini disokong oleh Mokorowu et al., (2020) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara dipengaruhi oleh Dana Alokasi Khusus.

KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan kesejahteraan suatu wilayah, maka perlunya strategi dalam menyusun kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah yakni dengan desentralisasi ekonomi dimana pemerintah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menangani wilayahnya sendiri. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel di Indonesia selama periode 2017-2021 menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum mempungai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengah hasil tersebut, maka diharapkan pemerintah di Indonesia lebih memperhatikan pengalokasian dananya agar pemberian dana tersebut tepat sasaran dan mampu menyokong perekonomian di Indonesia dikarenakan ketika pengalokasian dana tersebut tidak tepat sasaran akan menghambur-hamburkan uang negara dan bertambahnya utang negara yang akan berimbas pada penurunan pertumbuhan ekonomi.

BIBLIOGRAFI

Arina, M. M., Koleangan, R. A. M., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, *20*(01), 26–35. Https://Doi.Org/10.35794/Jpekd.23451.20.01.2019

Astria, S. A. (2014). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Selatan*. *12*(1), 42–54.

Bali, B. I. (2022). *Laporan Perekonomian Provinsi Bali 2o21*.

Barat, B. I. P. (2022). *Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat Februari 2021*.

Chandra, D., & Hidayat, S. (2017). *Dampak Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Daerah Di Provinsi Jambi*. *12*(2), 67–76.

Dinarjito, A., & Dharmazi, A. (2020). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Perumbuhan Ekonomi Regional Di Provinsi

Kalimantan Timur. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*.
Kaffah, S., & Daryono Soebagyo, M. E. (2021). *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa Tahun 2015-2019* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Latifah, & Rahayu, D. (2019). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhada Ketimpangan Antar Daerah*. *2*(4), 983–994.
Mokorowu, L. A., Rotinsulu, D. C., & Engka, D. S. M. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Bagi Hasil (Dbh, Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, *21*(04), 81–94.
Pujiati, A. (2004). *Ekonomi Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Karesidenan Semarang*. *33*, 61–70.
Rasu, K. J. E., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. . (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado. *2019*, *20*(4), 12–25.
Soebagyo, D., Fahmy-Abdullah, M., Sieng, L. W., & Panjawa, J. L. (2019). Income Inequality And Convergence In Central Java Under Regional Autonomy. *International Journal Of Economics And Management*, *13*(1), 203–215.
Tahar, A., & Zakhiya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Ummum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Invesntasi*, *12*(1), 88–99.
Wahyuni, A. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta. *Jurnal Stei*, *Xx*(Xx), 1–22. Www.Djpk.Go.Id.

Copyright holders:
Adhitya Rachma Nugraha, Daryono Soebagyo (2022)
First publication right:
Gema Ekonomi (Jurnal Fakultas Ekonomi)

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International